

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jepang menghadapi krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan yang ditandai dengan penurunan populasi dan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, total populasi Jepang pada tahun 2018 tercatat sebesar 127.707.259 jiwa kemudian tiap tahun konsisten menurun, pada akhirnya menjadi 124.330.690 juta jiwa pada tahun 2025. Jepang telah mengalami penurunan populasi lebih dari 3,3 juta jiwa dalam kurun waktu 7 tahun. Penurunan jumlah penduduk ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya proporsi kelompok usia lanjut, di mana lebih dari 29% penduduk Jepang kini berusia di atas 65 tahun (Ministry of Internal Affairs and Communications, n.d.). Di sisi lain, tingkat fertilitas total Jepang pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,3 kelahiran per perempuan, yang berarti rata-rata perempuan Jepang diperkirakan hanya melahirkan 1,3 anak sepanjang masa reproduksinya. Angka tersebut berada jauh dibawah *replacement level fertility* sebesar 2,1 kelahiran per perempuan, yaitu tingkat kelahiran minimum yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah populasi pada tingkat yang relatif stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rendahnya tingkat fertilitas ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong berlanjutnya penurunan populasi di Jepang (World Bank, n.d.-a).

Dampak krisis demografis ini menciptakan kekurangan tenaga kerja yang signifikan. *Recruit Works Institute* memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Jepang dengan populasi sekitar 120 juta jiwa akan menghadapi kekurangan tenaga kerja sekitar 3,41 juta orang, dan angka ini dapat meningkat hingga 11 juta orang pada tahun 2040 jika tren saat ini terus berlanjut (Future Predictions 2040 in Japan The Dawn of the Limited-Labor Supply Society, 2023). Berkurangnya tenaga kerja merupakan ancaman langsung terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sekaligus meningkatkan beban sistem kesejahteraan sosial yang pada akhirnya melemahkan kapabilitas negara.

Tekanan demografis yang saat ini dihadapi Jepang telah memberikan dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal negara. Penuaan penduduk yang berlangsung cepat telah mendorong peningkatan signifikan dalam pengeluaran pemerintah, khususnya untuk layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, dan sistem pensiun, sehingga mempersempit ruang fiskal yang tersedia bagi kebijakan pembangunan lainnya. Kondisi ini tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi telah tercermin dalam struktur belanja publik Jepang yang semakin terkonsentrasi pada pembiayaan kebutuhan sosial kelompok lanjut usia, sementara pada saat yang sama basis penerimaan pajak melemah akibat menyusutnya jumlah penduduk usia kerja. Penurunan tenaga kerja produktif juga telah membatasi kapasitas pertumbuhan ekonomi nasional, menghambat peningkatan produktivitas, serta memperlambat ekspansi output secara keseluruhan. Selain itu, tekanan fiskal yang meningkat memperumit upaya

pemerintah dalam menjaga kualitas layanan publik dan keberlanjutan sistem kesejahteraan di tengah struktur demografi yang terus memburuk (OECD, 2024a).

Sepanjang sejarah kebijakan imigrasinya, Jepang dikenal menerapkan pendekatan yang sangat berhati-hati terhadap masuknya tenaga kerja asing, khususnya bagi pekerja dengan keterampilan rendah dan menengah. Selama beberapa dekade, pemerintah Jepang cenderung menghindari kebijakan imigrasi permanen dan membatasi akses tenaga kerja asing melalui skema yang bersifat sementara dan selektif. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara untuk menjaga stabilitas sosial serta mengelola dampak domestik dari arus migrasi (Wakisaka, 2024). Namun, seiring dengan semakin intensnya tekanan demografis akibat penurunan populasi dan penuaan masyarakat, pendekatan tradisional tersebut mulai berhadapan dengan tuntutan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk mempertahankan kapasitas ekonomi dan keberlanjutan negara mendorong Jepang melakukan penyesuaian kebijakan imigrasi secara bertahap.

Titik balik yang menandai transformasi kebijakan imigrasi Jepang terjadi pada tahun 2018 ketika pemerintah mengamandemen *Immigration Control and Refugee Recognition Act* dan secara resmi memperkenalkan program *Specified Skilled Worker (SSW)* (*Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951)*, n.d.). Amandemen ini merupakan langkah revolusioner yang menandai perubahan signifikan, karena untuk pertama kalinya membuka akses yang lebih terbuka bagi pekerja asing berketerampilan menengah

untuk bekerja secara resmi di Jepang. Program SSW mencakup 14 sektor industri strategis, termasuk konstruksi, perawatan lanjut usia, pertanian, perikanan, dan manufaktur, serta beberapa sektor lainnya yang menghadapi kekurangan tenaga kerja. Perubahan kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pengakuan eksplisit Pemerintah Jepang bahwa solusi demografis memerlukan pendekatan yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap migrasi tenaga kerja.

Kebijakan ini tidak berhenti pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Pemerintahan selanjutnya, mulai dari Yoshihide Suga (2020-2021), Fumio Kishida (2021-2024), hingga Sanae Takaichi yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2025, menunjukkan keberlanjutan arah kebijakan yang relatif konsisten dalam merespons tekanan demografis yang semakin serius. Konsistensi lintas kepemimpinan ini mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan imigrasi Jepang tidak semata-mata merupakan hasil preferensi individu seorang pemimpin, melainkan mencerminkan pertimbangan negara yang bersifat rasional dan struktural. Dengan kata lain, kebijakan tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan demografis jangka panjang.

Pergeseran dari prinsip kebijakan yang cenderung tertutup terhadap imigran menuju penerapan program *Specified Skilled Worker* sejak 2018, serta keberlanjutannya hingga era pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada 2025, menunjukkan bahwa kepentingan nasional Jepang menjadi faktor utama

dalam transformasi kebijakan imigrasi negara tersebut. Kepentingan tersebut terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan kapasitas ekonomi dan ketahanan negara di tengah penurunan populasi yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis mengenai bagaimana krisis demografi mempengaruhi pemerintah Jepang dalam mentransformasi kebijakan imigrasi berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada periode 2018-2025 sebagai fase penting dalam perubahan kebijakan imigrasi Jepang dalam merespons kebutuhan tenaga kerja dan tekanan demografi yang semakin meningkat.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana krisis demografi mempengaruhi pemerintah Jepang dalam mentransformasi kebijakan imigrasi berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana krisis demografi mempengaruhi pemerintah Jepang dalam mentransformasi

kebijakan imigrasi berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional, dengan fokus pada program *Specified Skilled Worker* (SSW) periode 2018-2025.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana krisis demografi mempengaruhi pemerintah Jepang dalam mentransformasi kebijakan imigrasi berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penyusutan populasi usia produktif dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, menganalisis bagaimana krisis demografi dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Jepang, serta menjelaskan transformasi kebijakan imigrasi Jepang melalui program *Specified Skilled Worker* (SSW) sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan nasional Jepang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi migrasi internasional dan demografi dalam hubungan internasional. Secara teoritis,

penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana tekanan demografis dapat mendorong transformasi kebijakan imigrasi di negara dengan identitas nasional yang menjunjung tinggi homogenitas dan cenderung membatasi imigran. Temuan penelitian dapat memberikan pandangan baru dalam memahami adaptasi kebijakan negara terhadap tantangan demografis kontemporer.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan negara-negara yang menghadapi tantangan demografis serupa. Hasil analisis dapat memberikan pembelajaran mengenai strategi kebijakan imigrasi yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan pertimbangan sosial-politik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para pencari kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja Indonesia yang tertarik dengan peluang kerja di Jepang, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks kebijakan imigrasi saat ini dan prospek perubahannya di masa depan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Literature Review

“*Global Migration* sebagai Solusi Jepang dalam Menghadapi *Aging Population* Melalui *the Immigration Control and Refugee Recognition Act*” oleh Fitri Sholihin (2023) menganalisis bagaimana Jepang menghadapi tantangan populasi yang menua dan pertumbuhan penduduk yang melambat. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah demografis, Pemerintah Jepang mengamendemen *Immigration Control and Refugee Recognition Act* pada tahun 2018 sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja asing guna mengisi kekurangan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk kaitannya dengan strategi ekonomi *Abenomics* yang menempatkan migrasi sebagai solusi dalam menghadapi perubahan struktur demografi (Sholihin, 2023). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan imigrasi Jepang, namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana logika kepentingan nasional dalam perspektif realis, khususnya menyangkut upaya negara mempertahankan kapabilitas ekonominya sebagai komponen kekuatan nasional.

“*Skilled or Unskilled?: The Reconfiguration of Migration Policies in Japan*” oleh Nana Oishi (2021) mengeksplorasi pergeseran paradigma

dalam kebijakan migrasi Jepang yang sebelumnya sangat restriktif. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pengenalan visa *Specified Skilled Workers No.1* (SSW-1) sebagai instrumen kebijakan baru yang membuka peluang signifikan bagi pekerja migran tanpa pendidikan tinggi untuk bekerja di sektor-sektor seperti pertanian, perawatan lansia, dan konstruksi. Temuan penting dari penelitian ini adalah identifikasi terjadinya perubahan dalam definisi keterampilan dalam kebijakan migrasi Jepang, yang telah menciptakan peluang lebih besar bagi tenaga kerja asing dalam konteks mengatasi krisis tenaga kerja akibat penuaan populasi (Oishi, 2021). Meskipun penelitian ini memberikan analisis yang berharga mengenai perubahan kebijakan visa, penelitian ini belum secara eksplisit mengaitkan rekonfigurasi tersebut dengan logika kepentingan nasional dalam perspektif realis yakni bagaimana negara sebagai aktor rasional menyesuaikan kebijakan untuk memaksimalkan kekuatan dan kapabilitasnya di tengah tekanan struktural demografis.

“Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut” oleh Eryano dkk (2023) menyajikan analisis multidimensional tentang berbagai faktor yang menyebabkan fenomena aging population di Jepang serta respons kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap penuaan populasi, seperti penurunan angka kelahiran, urbanisasi, perubahan gaya hidup modern, serta peran gender yang masih tradisional, sekaligus menekankan kebijakan imigrasi

sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk usia produktif (Eryano et al., 2023). Meskipun memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor pendorong *aging population*, Penelitian tersebut belum secara spesifik menempatkan penuaan populasi sebagai tekanan struktural yang mempengaruhi arah kebijakan negara dalam jangka panjang. Selain itu, analisis mengenai bagaimana perubahan demografi tersebut berkaitan dengan pertimbangan strategis negara dalam merumuskan kebijakan imigrasi juga belum menjadi fokus utama kajian.

“Dam Break in Japan's Immigration Policy: The 2018 Reform in a Long-Term Perspective” oleh David Chiavacci (2025) memberikan analisis jangka panjang yang menempatkan amandemen 2018 dalam konteks empat fase perdebatan kebijakan imigrasi Jepang sejak dekade 1960-an. Chiavacci menunjukkan bahwa setiap gelombang reformasi kebijakan terjadi ketika tekanan ekonomi dari kekurangan tenaga kerja mencapai titik kritis, dan mendokumentasikan perluasan substansial program SSW pada Juni 2023 serta keputusan pemerintah pada Maret 2024 untuk lebih dari menggandakan kuota penerimaan menjadi 820.000 pekerja (Chiavacci, 2025). Kontribusi penting penelitian ini adalah pembuktian bahwa perluasan kebijakan SSW berlanjut bahkan di tengah meningkatnya resistensi politik domestik, yang mengindikasikan adanya tekanan struktural yang lebih kuat dari sekadar preferensi pemimpin. Namun, penelitian ini belum secara eksplisit menganalisis pola tersebut

dalam kerangka teoritis kepentingan nasional realis yang dapat menjelaskan secara sistematis mengapa kepentingan ekonomi nasional selalu mengalahkan resistensi ideologis dalam setiap siklus reformasi.

“Normalizing Exceptions and Accepting Differences: Japan's Pragmatic Pathway to Becoming an Immigrant Country” oleh Gracia Liu-Farrer (2025) berargumen bahwa Jepang secara de facto sedang bergerak menuju negara imigran, meskipun secara resmi masih menolak label tersebut. Perubahan ini tidak dilakukan melalui deklarasi politik besar, melainkan lewat pengecualian-pengecualian kebijakan (*policy exceptions*) yang kemudian dinormalisasi. Disebutkan bahwa terdapat penambahan empat sektor industri baru pada Maret 2024 dan berlanjutnya ekspansi program SSW di bawah tekanan demografis yang kian memburuk (Liu-Farrer, 2025). Penelitian ini relevan karena menunjukkan bagaimana negara bertindak secara kalkulatif dalam merespons tekanan struktural, mendahulukan kepentingan nasional di atas konsistensi ideologis. Ini adalah sebuah pola yang selaras dengan logika realis, meskipun penelitian ini sendiri tidak menempatkan analisisnya dalam kerangka tersebut.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan penelitian melalui penggunaan konsep kepentingan nasional dalam perspektif realisme klasik Hans J. Morgenthau untuk membaca transformasi kebijakan imigrasi Jepang pada periode 2018–2025. Kebaruan penelitian ini tidak terletak

pada objek kajian maupun kebijakan yang dianalisis, melainkan pada sudut pandang analitis yang menempatkan perubahan kebijakan imigrasi sebagai hasil dari kalkulasi negara dalam mempertahankan kapabilitas dan keberlanjutan nasional di tengah tekanan demografis. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan kebijakan imigrasi Jepang sebagai respons strategis terhadap penurunan populasi, bukan semata-mata sebagai fenomena kebijakan sektoral atau dinamika sosial.

Berbeda dengan penelitian Sholihin (2023), Oishi (2021), dan Eryano et al. (2023) yang lebih menekankan aspek deskriptif, teknis kebijakan, atau faktor-faktor penyebab penuaan populasi, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada logika kepentingan nasional yang mendasari perubahan kebijakan negara. Sementara itu, dibandingkan dengan kajian Chiavacci (2025) dan Liu-Farrer (2025) yang menyoroti dinamika historis dan proses normalisasi kebijakan, penelitian ini menawarkan kerangka penjelasan yang lebih terpusat pada pertimbangan strategis negara sebagai aktor rasional. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif realisme untuk menjelaskan hubungan antara krisis demografi dan transformasi kebijakan imigrasi Jepang berdasarkan kepentingan nasional.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori realisme sebagai kerangka teoritis utama untuk menganalisis perubahan kebijakan imigrasi Jepang dalam menghadapi tekanan demografis. Realisme klasik yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau menempatkan kepentingan nasional sebagai pendorong utama perilaku negara, yang dipahami dalam kaitannya dengan kekuatan nasional (*power*). Morgenthau menegaskan bahwa konsep kepentingan yang didefinisikan melalui kekuatan merupakan prinsip dasar dalam memahami tindakan negara di arena politik internasional (Morgenthau et al., 2006). Dalam kerangka ini, negara dipandang sebagai aktor yang berupaya mempertahankan dan meningkatkan kapabilitasnya melalui kebijakan yang dianggap paling efektif. Kekuatan ekonomi, khususnya, diposisikan sebagai komponen penting dari kapabilitas nasional di era kontemporer.

Kerangka realis menjadi relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan analisis mengenai bagaimana tekanan demografis, seperti penurunan populasi dan menyusutnya tenaga kerja, dipahami negara sebagai tantangan terhadap kepentingan nasionalnya. Berkurangnya angkatan kerja berimplikasi pada lemahnya produktivitas, meningkatnya beban sistem kesejahteraan, serta menurunnya kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Kondisi tersebut berpotensi mengancam posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Dalam perspektif

realisme, ancaman terhadap kapabilitas ekonomi ini mendorong negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan guna mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, kebijakan imigrasi dipahami sebagai respons terhadap tekanan struktural, bukan sebagai perubahan normatif semata.

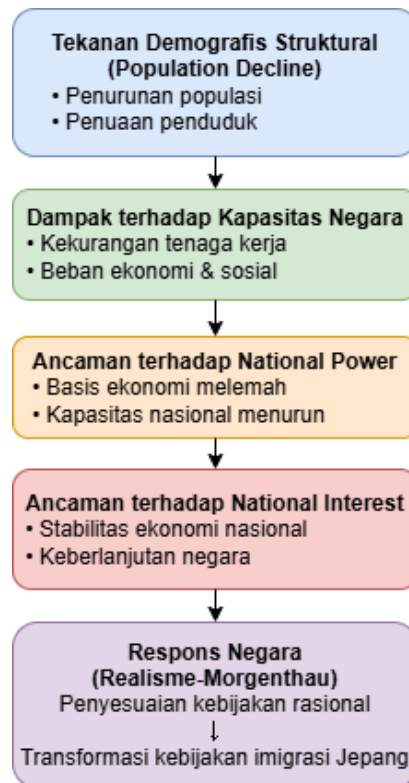
Kalkulasi kepentingan nasional ini menjelaskan mengapa Jepang, yang selama puluhan tahun mempertahankan kebijakan imigrasi yang ketat, akhirnya mengadopsi program *Specified Skilled Worker* pada tahun 2018. Kebijakan tersebut tidak menandai pelepasan kontrol negara atas arus migrasi, melainkan menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan yang bersifat terukur dan pragmatis. Jepang membuka akses bagi pekerja asing berketerampilan menengah di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja paling kritis. Pada saat yang sama, negara tetap mempertahankan mekanisme pengendalian melalui pembatasan sektor, persyaratan kompetensi, serta durasi izin tinggal. Langkah ini mencerminkan upaya negara untuk memperoleh manfaat ekonomi dari tenaga kerja asing sambil menjaga stabilitas domestik.

Keberlanjutan program *Specified Skilled Worker* di bawah berbagai pemerintahan, mulai dari era Shinzo Abe hingga pemerintahan berikutnya, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak bergantung pada preferensi individu pemimpin. Sebaliknya, kontinuitas tersebut mencerminkan adanya tekanan struktural yang bersifat konsisten dan berjangka panjang.

Dalam kerangka realisme, pola ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional menjadi faktor penentu utama dalam arah kebijakan negara. Perubahan dan keberlanjutan kebijakan imigrasi Jepang dengan demikian dipahami sebagai respons negara terhadap tantangan sistemik yang terus berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan imigrasi berfungsi sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga kapabilitas nasional.

Pendekatan realis juga membantu menjelaskan mengapa transformasi kebijakan imigrasi Jepang bersifat selektif dan terbatas, bukan terbuka secara menyeluruh. Selektivitas tersebut mencerminkan pertimbangan rasional negara dalam menentukan sektor-sektor yang paling membutuhkan tenaga kerja asing dan paling berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi nasional. Di sisi lain, pembatasan pada sektor lain tetap dipertahankan untuk mengelola potensi dampak sosial yang dapat mengganggu stabilitas domestik. Dengan demikian, kebijakan imigrasi Jepang bergerak ke arah yang lebih pragmatis namun tetap terkontrol. Kerangka realis memungkinkan pemahaman yang koheren mengenai kebijakan ini sebagai hasil dari kalkulasi kepentingan nasional dalam menghadapi tekanan demografis yang semakin nyata.

Realisme - Hans J. Morgenthau



Gambar 1.1. Bagan Pemikiran Teoritis

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Penelitian ini berpijak pada kondisi struktural yang dihadapi Jepang berupa tekanan demografis jangka panjang, yang ditandai oleh penurunan jumlah penduduk dan meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut. Dinamika ini secara langsung menyebabkan penyusutan tenaga kerja usia produktif dan meningkatnya beban ekonomi serta sosial yang harus ditanggung negara. Dalam konteks tersebut, tekanan demografis tidak hanya dipahami sebagai persoalan kependudukan semata, melainkan sebagai faktor struktural yang mempengaruhi kapasitas negara dalam

mempertahankan kinerja ekonomi dan stabilitas sosial. Dalam perspektif realisme klasik, negara akan berupaya mempertahankan kepentingan nasionalnya ketika menghadapi kondisi yang berpotensi melemahkan kekuatan negara. Morgenthau menegaskan bahwa kepentingan nasional dipahami dalam kaitannya dengan kekuatan (*interest defined in terms of power*), sehingga berbagai tantangan yang mengancam kapasitas ekonomi dan sumber daya manusia negara perlu direspons melalui kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan kekuatan nasional (Morgenthau et al., 2006). Dari sudut pandang ini, tekanan demografis yang dihadapi Jepang dapat dipahami sebagai tantangan terhadap kemampuan negara dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan kapasitas nasionalnya.

Ancaman terhadap kapasitas ekonomi tersebut selanjutnya berimplikasi langsung pada kepentingan nasional Jepang, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Menyusutnya tenaga kerja usia produktif berpotensi menurunkan kapasitas produksi, memperbesar tekanan terhadap sistem kesejahteraan sosial, serta mengurangi daya saing ekonomi Jepang di tingkat global. Dalam perspektif realisme klasik, kondisi yang berpotensi melemahkan fondasi kekuatan negara akan mendorong negara untuk mencari langkah-langkah yang dapat mempertahankan kapasitas nasionalnya dengan rasional (Morgenthau et al., 2006). Jepang kemudian menyadari bahwa mempertahankan kebijakan imigrasi yang restriktif tidak lagi memadai untuk mengatasi tekanan struktural tersebut, meskipun

negara tetap berhati-hati terhadap potensi risiko sosial dan politik dari perubahan kebijakan.

Sebagai respons rasional atas ancaman terhadap kekuatan dan kepentingan nasional tersebut, Jepang melakukan penyesuaian kebijakan imigrasi melalui pergeseran dari pendekatan restriktif terhadap imigran menuju pendekatan yang lebih terbuka namun tetap terukur. Transformasi ini diwujudkan melalui amandemen Immigration Control and Refugee Recognition Act pada tahun 2018 serta pembentukan program *Specified Skilled Worker (SSW)*, yang dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada sektor-sektor strategis secara terbatas dan terkontrol. Kebijakan ini memungkinkan masuknya pekerja asing berketerampilan menengah berdasarkan kebutuhan nasional, tanpa mengubah secara fundamental prinsip kontrol negara terhadap imigrasi. Dengan demikian, program SSW dipahami sebagai instrumen strategis negara untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan kepentingan nasional di tengah tekanan demografis yang semakin intens, bukan sebagai pergeseran ideologis menuju model negara imigran.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1. *National Interest*

Konsep national interest merupakan konsep sentral dalam realisme klasik dan menjadi dasar utama dalam memahami perilaku negara. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional didefinisikan sebagai kepentingan yang berakar pada kekuasaan (*interest defined in terms of power*). Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional bersifat objektif dan tidak bergantung pada preferensi moral atau ideologis individu pembuat kebijakan. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas dan kapasitas negara. Dengan demikian, national interest menjadi alat analisis untuk menjelaskan tindakan negara dalam menghadapi tantangan struktural (Morgenthau et al., 2006, p. 5).

Morgenthau juga menjelaskan bahwa meskipun kepentingan nasional bersifat objektif, bentuk konkret dari kepentingan tersebut dapat berubah seiring perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Artinya, kepentingan nasional tidak bersifat statis, melainkan menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi negara pada suatu periode tertentu. Dalam konteks perubahan demografi, kepentingan nasional dapat mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan stabilitas sosial. Dengan demikian, national interest dipahami sebagai konsep yang fleksibel namun

tetap berakar pada kebutuhan dasar negara. Pemahaman ini memungkinkan analisis kebijakan imigrasi sebagai bagian dari upaya negara menjaga kepentingan nasionalnya (Morgenthau et al., 2006, pp. 11–14)

2. *National Power*

Konsep *national power* dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan negara untuk mempertahankan dan menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dalam sistem internasional. Dalam realisme klasik yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau, kekuatan nasional dipahami sebagai hasil dari berbagai unsur yang menopang kapasitas negara, tidak terbatas pada kekuatan militer semata. Morgenthau secara eksplisit memasukkan faktor demografi, khususnya jumlah dan kualitas penduduk, sebagai salah satu elemen utama kekuatan nasional karena populasi menentukan kapasitas produksi, administrasi, dan keberlanjutan negara. Dengan demikian, perubahan struktur penduduk dapat mempengaruhi posisi dan kemampuan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, *national power* dipahami sebagai konsep yang berkaitan erat dengan kondisi internal negara (Morgenthau et al., 2006, pp. 137–139).

Lebih lanjut, *national power* dalam penelitian ini digunakan secara terbatas dan kontekstual, dengan fokus pada basis demografis dan ekonomi dari kekuatan negara. Morgenthau menegaskan bahwa kekuatan nasional bersifat dinamis dan dapat mengalami peningkatan atau

penurunan seiring perubahan kondisi objektif yang dihadapi negara. Penurunan jumlah penduduk dan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia dipandang sebagai faktor yang secara perlahan melemahkan fondasi kekuatan nasional. Dalam konteks ini, *national power* tidak dimaknai sebagai kemampuan untuk mendominasi negara lain, melainkan sebagai kapasitas internal negara untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi sosial dan ekonomi. Pembatasan ini selaras dengan penekanan Morgenthau bahwa kekuatan nasional harus dipahami sesuai konteks empiris yang dianalisis (Morgenthau et al., 2006, pp. 145–147).

3. *Population Decline*

Population decline mengacu pada penurunan jumlah penduduk secara terus-menerus dalam jangka panjang yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran. Menurut David S. Reher, konsep ini merujuk pada kondisi ketika angka kelahiran berada jauh dibawah 2,1 kelahiran per perempuan, jumlah perempuan usia subur berkurang, dan tingkat kelahiran keseluruhan terus melemah. Angka 2,1 (dua koma satu) merupakan desimal yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang harus dilahirkan oleh setiap perempuan dalam populasi (Reher, 2007, pp. 190–193). Dalam demografi, angka ini disebut sebagai tingkat fertilitas penggantian (*replacement level fertility*) yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas populasi dalam jangka panjang. Logika sederhananya setiap pasangan terdiri dari dua orang (suami dan istri) yang perlu digantikan

oleh dua anak, namun ditambah 0,1 untuk mengkompensasi kemungkinan kematian anak sebelum mencapai usia reproduktif (Carey et al., 2018).

Fenomena *population decline* umumnya dipicu oleh berbagai faktor sosioekonomi yang saling terkait dalam masyarakat modern. Modernisasi ekonomi mengubah pola hidup tradisional dari masyarakat agraris yang membutuhkan banyak anak sebagai tenaga kerja, menuju masyarakat industri dan jasa yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas anak. Peningkatan tingkat pendidikan, terutama pada perempuan, menciptakan kecenderungan untuk menunda pernikahan dan kelahiran demi mengejar karir dan pencapaian pribadi. Urbanisasi memperparah situasi dengan menciptakan biaya hidup tinggi dan ruang terbatas, sehingga membesarkan anak menjadi sangat mahal dan menantang. Pergeseran nilai-nilai sosial juga berperan penting, dimana masyarakat modern lebih memprioritaskan kualitas hidup individual, kebebasan pribadi, dan pencapaian karir dibandingkan pembentukan keluarga besar.

Population decline berbeda secara fundamental dengan stagnasi populasi karena bersifat struktural dan berkelanjutan, menciptakan pola penurunan yang sulit dibalik tanpa intervensi besar-besaran. Konsep ini juga mencakup fenomena penuaan populasi dimana proporsi penduduk lanjut usia terus meningkat sementara kelompok usia produktif semakin berkurang, menciptakan beban ekonomi dan sosial yang berat. *Population decline* sebagai konsep demografis menggambarkan proses sistematis

yang terkait dengan tahap lanjut transisi demografi suatu masyarakat, dimana negara telah melewati fase pertumbuhan populasi dan memasuki era penyusutan berkelanjutan. Reher menekankan bahwa konsep ini tidak sekadar menunjukkan angka statistik yang menurun, melainkan mencerminkan transformasi fundamental dalam struktur sosial yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam ekonomi, sistem kesejahteraan, dan dinamika sosial masyarakat (Reher, 2007, pp. 190–193).

1.6.2. Definisi Operasional

1. *National Interest*

Secara operasional, *national interest* dalam penelitian ini dianalisis melalui cara pemerintah Jepang mendefinisikan dan memprioritaskan tujuan-tujuan negara dalam merespons tekanan struktural akibat penurunan populasi. Operasionalisasi konsep ini dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan resmi, pidato Perdana Menteri, serta regulasi imigrasi pasca 2018 untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan yang secara konsisten dikonstruksikan sebagai kepentingan strategis negara. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana isu stabilitas ekonomi, keberlanjutan sistem jaminan sosial, dan ketersediaan tenaga kerja produktif diperlihatkan sebagai kepentingan negara yang bersifat mendesak. Dalam kerangka realisme klasik, kepentingan nasional dipahami sebagai kepentingan yang didefinisikan oleh negara dalam

kaitannya dengan upaya mempertahankan kapasitas dan keberlangsungan negara (Morgenthau et al., 2006).

Operasionalisasi selanjutnya difokuskan pada bagaimana tekanan demografis digunakan sebagai dasar rasional dalam perumusan kebijakan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana data penurunan populasi, meningkatnya rasio penduduk lanjut usia, dan proyeksi kekurangan tenaga kerja digunakan dalam dokumen kebijakan sebagai indikator yang memperlihatkan perlunya intervensi negara di bidang imigrasi. Misalnya, penyusutan populasi Jepang hingga di bawah 125 juta jiwa pada 2023 serta tingginya proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun dijadikan argumen utama bahwa keberlanjutan ekonomi dan sistem sosial berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, kepentingan nasional dianalisis sebagai hasil dari proses penalaran negara dalam menafsirkan ancaman struktural terhadap kapasitas nasionalnya.

National interest juga dioperasionalkan melalui analisis bentuk dan batasan kebijakan *Specified Skilled Worker* Sebagai cerminan konkret dari prioritas negara. Pembatasan jumlah pekerja asing, sektor kerja yang diperbolehkan, serta pembatasan hak tinggal jangka panjang dianalisis sebagai indikator bagaimana negara berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa kehilangan kontrol atas stabilitas domestik. Penelitian ini menilai bagaimana kebijakan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan akan tenaga kerja asing dan kehati-hatian negara dalam

mengelola perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, kepentingan nasional dipahami bukan hanya sebagai tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga sebagai kerangka pembatas yang membentuk arah, skala, dan karakter perubahan kebijakan imigrasi Jepang secara keseluruhan.

2. *National Power*

Secara operasional, *national power* dalam penelitian ini dipahami sebagai kapasitas internal Jepang yang dipengaruhi secara langsung oleh perubahan demografis, khususnya penurunan jumlah penduduk dan kekurangan tenaga kerja. Konsep ini dianalisis dengan melihat indikator-indikator struktural yang berkaitan dengan kemampuan negara untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan sistem sosial dalam jangka panjang. Fokus utama diarahkan pada penurunan jumlah penduduk usia produktif, peningkatan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia, serta proyeksi kekurangan tenaga kerja yang semakin membesar. Dalam kerangka realisme klasik, faktor-faktor tersebut dipandang sebagai elemen dasar yang menopang kekuatan negara, karena populasi dan kapasitas ekonomi merupakan pondasi utama bagi daya tahan nasional (Morgenthau et al., 2006).

Analisis kemudian menyoroti bagaimana melemahnya basis demografis ini dipahami sebagai tantangan terhadap kekuatan nasional Jepang dalam wacana kebijakan resmi. Penelitian ini menelaah berbagai data yang menunjukkan bahwa menyusutnya angkatan kerja dan

meningkatnya jumlah penduduk lansia berpotensi menekan produktivitas ekonomi, membebani sistem jaminan sosial, serta mempersempit ruang fiskal negara. Kondisi tersebut dianalisis sebagai masalah struktural yang dapat mengurangi kemampuan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonominya secara stabil. Dengan demikian, penurunan populasi diperlakukan sebagai faktor yang secara langsung mempengaruhi kekuatan nasional dalam dimensi non-militer.

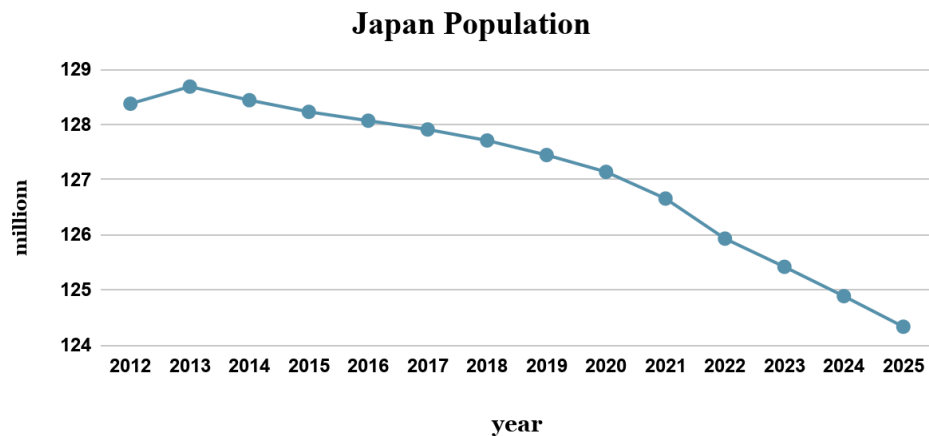
Terakhir *national power* dioperasionalkan melalui analisis kebijakan yang diambil pemerintah Jepang untuk merespons keterbatasan demografis tersebut. Kebijakan imigrasi, khususnya melalui program *Specified Skilled Worker*, dianalisis sebagai instrumen negara untuk menjaga kapasitas internal di tengah berkurangnya sumber daya manusia domestik. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dibingkai sebagai upaya strategis untuk menopang kegiatan ekonomi dan menjaga keberlanjutan sistem sosial nasional. Dengan pendekatan ini, perubahan kebijakan imigrasi dipahami sebagai bagian dari strategi negara untuk mempertahankan kekuatan nasional, terutama dalam arti kemampuan negara untuk tetap berfungsi secara efektif di tengah tekanan demografis jangka panjang.

3. Population Decline

Secara operasional, *population decline* dalam penelitian ini dianalisis melalui pengkajian indikator-indikator demografis yang menunjukkan penurunan populasi sistemik di Jepang dan dampaknya terhadap transformasi kebijakan imigrasi. Operasionalisasi dilakukan dengan menganalisis data statistik resmi yang menunjukkan penyusutan populasi Jepang setiap tahunnya yang pada akhirnya menjadi 124.330.690 juta jiwa pada tahun 2025 (Ministry of Internal Affairs and Communications, n.d.). Tingkat fertilitas yang hanya mencapai 1,3 kelahiran per perempuan pada tahun 2022, jauh di bawah angka penggantian populasi 2,1 (*Fertility Rate, Total (Births per Woman) - Japan*, 2022). serta proyeksi kekurangan tenaga kerja sekitar 3,41 juta orang pada tahun 2030 dan hingga 11 juta orang pada tahun 2040 menurut Recruit Works Institute (*Future Predictions 2040 in Japan The Dawn of the Limited-Labor Supply Society*, 2023).

Analisis akan fokus pada bagaimana data-data demografis ini dijadikan justifikasi empiris dalam dokumen kebijakan resmi untuk melegitimasi perubahan paradigma imigrasi, termasuk bagaimana statistik penuaan populasi dengan 29% penduduk berusia di atas 65 tahun digunakan sebagai argumen kunci dalam pernyataan-pernyataan politik yang membingkai krisis demografi sebagai ancaman eksistensial bagi keberlanjutan negara. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana proyeksi demografis jangka panjang digunakan sebagai alat diskursif

untuk membenarkan langkah-langkah darurat dalam kebijakan imigrasi, khususnya melalui program *Specified Skilled Worker* yang membuka akses bagi pekerja asing berketerampilan menengah sebagai respons terhadap ancaman demografis yang dipersepsikan.



Grafik 1.1. Pertumbuhan Populasi di Jepang

Sumber: Ministry of Internal Affairs and Communication 2025

Grafik demografis Jepang periode 2012-2025 menunjukkan manifestasi konkret dari konsep *population decline* sebagaimana didefinisikan oleh David S. Reher, yaitu kondisi ketika suatu negara mengalami penurunan populasi yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jepang mencapai puncaknya pada tahun 2013 sebesar 128.684.379 jiwa, kemudian terus mengalami penurunan hingga menjadi 124.330.690 jiwa pada tahun 2025. Dengan demikian, Jepang kehilangan sekitar 4.353.689 jiwa dalam kurun waktu dua belas tahun (Ministry of

Internal Affairs and Communications, n.d.). Pola penurunan yang linear dan konsisten dengan rata-rata 362.807 jiwa per tahun ini mencerminkan karakteristik struktural *population decline* yang bersifat berkelanjutan dan sulit dibalik, bukan sekadar stagnasi populasi. Terlihat dari grafik ini bahwa Jepang telah memasuki tahap lanjut transisi demografi dengan pertumbuhan populasi negatif yang persisten, sesuai dengan definisi Reher tentang *population decline* sebagai proses sistematis yang menandai transformasi fundamental dari masyarakat dengan pertumbuhan positif menuju masyarakat dengan penurunan populasi berkelanjutan (Reher, 2007).

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa krisis demografi menjadi faktor utama yang mendorong transformasi kebijakan imigrasi Jepang berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Penurunan populasi dipahami sebagai tantangan struktural yang secara langsung melemahkan basis kekuatan nasional (*national power*), khususnya dalam dimensi sumber daya manusia dan kapasitas ekonomi. Berkurangnya jumlah penduduk usia produktif serta meningkatnya beban ketergantungan penduduk lanjut usia menciptakan tekanan nyata terhadap kemampuan negara dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan sistem sosial. Dalam perspektif realisme klasik, kondisi ini dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional (*national interest*), karena menyangkut

kemampuan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara efektif. Oleh karena itu, perubahan kebijakan imigrasi dipahami bukan sebagai penyimpangan normatif, melainkan sebagai respons rasional negara terhadap keterbatasan struktural yang semakin menguat.

Perubahan kebijakan imigrasi melalui program *Specified Skilled Worker* yang diperkenalkan dalam amandemen *Immigration Control and Refugee Recognition Act* 2018 mencerminkan upaya negara Jepang untuk mempertahankan *national power* dalam kondisi demografis yang menurun. Kebijakan ini dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi yang dianggap vital, tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi ciri kebijakan imigrasi Jepang. Pembatasan sektor, jenis pekerjaan, dan mekanisme seleksi menunjukkan bahwa negara tetap memprioritaskan stabilitas domestik dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, transformasi kebijakan imigrasi Jepang tidak mencerminkan perubahan identitas nasional secara mendasar, melainkan penyesuaian strategis yang terukur untuk menjaga kapasitas dan keberlangsungan negara. Argumen ini menegaskan bahwa kebijakan imigrasi Jepang merupakan instrumen negara dalam merespons tekanan demografis demi mempertahankan kekuatan dan kepentingan nasional dalam jangka panjang.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perubahan kebijakan imigrasi Jepang dalam merespons penurunan populasi yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam hubungan sebab-akibat antara tekanan demografis dan respons kebijakan negara. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana *population decline* mempengaruhi kapasitas internal negara dan mendorong penyesuaian kebijakan imigrasi sebagai instrumen negara. Pendekatan ini relevan untuk memahami kebijakan imigrasi Jepang sebagai respons strategis negara terhadap keterbatasan struktural yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kebijakan imigrasi sebagai hasil pertimbangan rasional negara dalam menjaga kepentingan nasional.

1.8.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat eksplanatif. Penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana perubahan kebijakan imigrasi Jepang terjadi dalam konteks penurunan populasi dan penuaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan hubungan antara *population decline* dengan upaya negara mempertahankan *national power* dan *national interest*. Penelitian eksplanatif memungkinkan analisis yang sistematis terhadap faktor-faktor struktural yang mendorong negara melakukan penyesuaian kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan kebijakan, tetapi juga menjelaskan logika di balik keputusan negara tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ditetapkan di Semarang, Indonesia, yaitu tempat di mana peneliti melakukan proses pengumpulan dan analisis data. Meskipun objek kajian adalah kebijakan imigrasi Jepang, penelitian ini dilaksanakan di Semarang dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang tersedia secara daring dan melalui akses perpustakaan digital institusi akademik.

1.8.3. Subjek Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan data sekunder, subjek penelitian mencakup berbagai aktor dan institusi yang terdokumentasi dalam sumber-sumber yang akan dianalisis. Subjek penelitian meliputi Pemerintah Jepang sebagai pembuat kebijakan, khususnya yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan imigrasi, kalangan akademisi dan peneliti yang mengkaji isu demografi dan kebijakan imigrasi Jepang, organisasi internasional yang memonitor perkembangan demografis dan kebijakan migrasi, serta berbagai pemangku kepentingan lain yang perspektifnya terdokumentasi dalam literatur dan dokumen kebijakan yang akan dianalisis.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa teks, dokumen tertulis, dan informasi yang terdokumentasi dalam berbagai sumber sekunder. Jenis data yang akan digunakan meliputi dokumen kebijakan resmi Pemerintah Jepang terkait imigrasi dan demografi, publikasi akademis dari jurnal-jurnal ilmiah internasional dan nasional, laporan statistik dan analisis dari lembaga-lembaga resmi Jepang maupun organisasi internasional, artikel dan analisis dari media terpercaya, serta dokumen-dokumen resmi lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya dan relevan. Sumber data utama meliputi dokumen kebijakan resmi dari Pemerintah Jepang, khususnya yang terkait dengan *Immigration Control and Refugee Recognition Act* dan program *Specified Skilled Worker (SSW)*, publikasi akademis dari jurnal-jurnal internasional yang membahas kebijakan imigrasi dan demografi Jepang, laporan statistik dari *Statistics Bureau of Japan dan Ministry of Health, Labour and Welfare* Jepang, serta publikasi dari organisasi internasional seperti OECD, UN *Population Division*.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi dan seleksi dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, dilanjutkan dengan pengunduhan dan pengorganisasian dokumen berdasarkan kategori dan periode waktu. Peneliti akan melakukan pencarian literatur menggunakan database akademis seperti JSTOR, Elsevier, dan Google Scholar dengan kata kunci yang telah ditentukan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis tematik untuk mengolah data. Proses dimulai dengan membaca dokumen secara menyeluruh, dilanjutkan dengan menganalisis untuk menemukan tema utama yang menjawab pertanyaan penelitian. Metode perbandingan konstan dan triangulasi akan diterapkan untuk meningkatkan validitas. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, disertai kutipan langsung dari partisipan untuk mendukung temuan.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan beberapa kriteria untuk memastikan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Kredibilitas data akan dipastikan melalui triangulasi

sumber dengan menggunakan berbagai jenis dokumen dari institusi yang berbeda dan berkredibilitas tinggi. Dokumen pemerintah resmi yang akan digunakan meliputi *Immigration Control and Refugee Recognition Act* beserta amandemennya dari *Japanese Law Translation Database*, laporan statistik demografis dari *Statistics Bureau of Japan*, dokumen kebijakan dari *Ministry of Health, Labour and Welfare Jepang*, serta pidato dan pernyataan resmi dari *Prime Minister's Office of Japan*. Publikasi akademis akan diambil dari database jurnal internasional bereputasi seperti JSTOR, Elsevier, ScienceDirect, Scopus, dan Google Scholar yang menyediakan akses terhadap artikel-artikel dari berbagai jurnal internasional terkemuka. Laporan organisasi internasional yang akan digunakan mencakup data demografis dari *UN Population Division*, analisis kebijakan migrasi dari OECD, serta laporan penelitian dari lembaga riset terpercaya seperti *Recruit Works Institute* dan *World Bank Group*.

Validitas penelitian akan dijaga melalui dokumentasi yang sistematis terhadap seluruh proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan penelusuran kembali terhadap setiap langkah penelitian. Objektivitas akan ditingkatkan melalui penggunaan kutipan langsung dari sumber-sumber primer dan refleksi kritis peneliti terhadap bias yang mungkin muncul dalam proses interpretasi, khususnya dalam menganalisis dokumen yang berasal dari berbagai latar belakang ideologis dan institusional. Keandalan temuan akan diperkuat dengan memastikan

representasi yang seimbang dari berbagai perspektif yang terdapat dalam literatur, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.